

**AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
WARALABA/*FRANCHISE*  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 995 K/Pdt/2015)**

**Hans Kosasih  
NPM : 03051170007**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara pewaralaba dan terwaralaba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 995 K/Pdt/2015. Serta mengetahui penyelesaian sengketa akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba PT Star Abadi Ratu Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 995 K/Pdt/2015. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah tentang pelaksanaan perjanjian waralaba dan analisis perjanjian perjanjian waralaba SARI Salon & Day Spa Cabang Grogol.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif yang mendeskripsikan tentang penerapan hukum pada wanprestasi dalam perjanjian waralaba yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 995 K/Pdt/2015.

Hasil penelitian pertama, pelaksanaan perjanjian waralaba antara PT Star Abadi Ratu Indonesia dengan Tuan Subandi tidak dilaksanakan sesuai dengan Akta Perjanjian Waralaba "SARI" Nomor 01 yang dibuat di hadapan Notaris Faizal Irawan, SH sebab Tuan Subandi dengan sepihak, tanpa izin menggunakan tempat/fasilitas tempat berlangsungnya usaha waralaba untuk kepentingan pribadi serta menutup usaha waralaba. Hal ini menyebabkan dilanggarnya Pasal 16 Akta Perjanjian Waralaba SARI Nomor 01 tanggal 21 Juni 2007 sehingga tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi dan sesuai dengan Pasal 16 Akta Perjanjian Waralaba "SARI" ayat 4 No.01 tanggal 21 Juni 2007 dengan denda/penalty sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kedua, penyelesaian sengketa dalam perjanjian waralaba yang dimana hakim mempertimbangkan hukum berdasarkan Pasal 1320, 1234, 1244, 1338 KUHPerdara sebab terdapat ketidakefektifan dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba disebabkan oleh kedudukan ataupun hierarki yang lebih rendah sehingga berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* bahwa peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan yang lebih rendah sehingga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan mengabaikan ketentuan hukum berkaitan dengan kewajiban pendaftaran waralaba serta sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Wanprestasi, Perjanjian, Waralaba (*Franchise*), Putusan Mahkamah Agung 995 K/Pdt/2015.**

**LEGAL CONSEQUENCES OF A DEFAULT IN A FRANCHISE  
AGREEMENT (STUDY OF DECISION SUPREME COURT  
NO. 995 K/Pdt/2015)**

**Hans Kosasih  
NPM : 03051170007**

**ABSTRACT**

This study aims to determine the implementation of the agreement between the franchisee and the franchisee in the Supreme Court Decision Number 995 K/Pdt/2015. As well as knowing the resolution of disputes due to default in the franchise agreement of PT Star Abadi Ratu Indonesia in the Supreme Court Decision Number 995 K/Pdt/2015. The problems discussed in this thesis are about the implementation of the franchise agreement and the analysis of the franchise agreement of the SARI Salon & Day Spa Grogol Branch.

The research method used is normative juridical research, the law is conceptualized as what is contained in the legislation. The nature of the research in this thesis is a descriptive study that describes the application of the law to default in the franchise agreement contained in the Supreme Court's decision Number 995 K/Pdt/2015.

The results of the first study, the implementation of the franchise agreement between PT Star Abadi Ratu Indonesia and Mr. Subandi was not carried out in accordance with the Deed of Franchise Agreement "SARI" Number 01 which was made before Notary Faizal Irawan, SH because Mr. Subandi unilaterally, without permission to use the place / facility the ongoing franchise business for personal interests and closing the franchise business. This resulted in the violation of Article 16 of the Deed of SARI Franchise Agreement Number 01 dated June 21, 2007 so that the defendant was declared in default and in accordance with Article 16 of the Deed of Franchise Agreement "SARI" paragraph 4 No.01 dated June 21, 2007 with a fine/penalty of Rp.500,000. 000, - (five hundred million rupiah). Second, dispute resolution in franchise agreements where judges consider the law based on Articles 1320, 1234, 1244, 1338 of the Civil Code because there is an ineffectiveness of Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising caused by a lower position or hierarchy so that based on the principle of *lex superior derogat legi inferiori* that the higher laws and regulations may override the lower ones so that the Panel of Judges only considers the Civil Code and ignores the legal provisions relating to franchise registration obligations as well as the sanctions regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising.

**Keywords : Legal Consequences, Default, Franchise, Agreement, Decision Supreme Court No. 995 K/Pdt/2015.**